



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batam Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

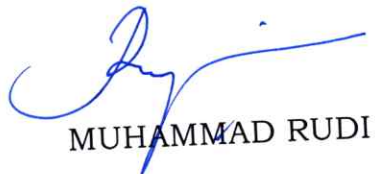
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

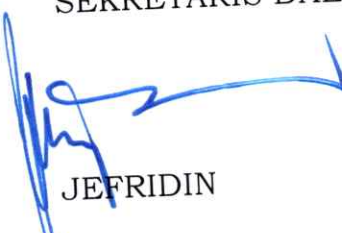
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1534



**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA**



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN BATAM
KOTA TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 ini.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Batam Kota adalah dokumen rancangan perencanaan Kecamatan Batam Kota untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota disusun sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Batam Kota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Batam Kota pada khususnya.

Batam, Juni 2024

CAMAT BATAM KOTA



FIRMAN HIDAYAT, S.E
NIP. 19850522 201101 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR _____ 3

PENDAHULUAN _____ 4

1.1 Latar Belakang _____ 5

1.2 Landasan Hukum _____ 6

1.3 Maksud dan Tujuan _____ 8

1.4 Sistematika Penulisan _____ 9

BAB II _____ 10

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN _____ 10

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Batam Kota Triwulan II 10

BAB III _____ 19

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH _____ 19

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD _____ 19

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 _____ 20

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 _____ 20

BAB IV _____ 75

PENUTUP _____ 75

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja _____ 75

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan _____ 75

5.3 Rencana Tindak Lanjut _____ 76

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Sampai
dengan Triwulan II Tahun 2024 11

Tabel 3.1 Rekap Rincian Perubahan Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Akhir Perubahan Kecamatan Batam Kota merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup, Non Urusan dan Kewilayahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. penyusunan Rancangan Renja
- d. Perumusan Rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Kecamatan Batam Kota disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 dan ke-5. Misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan di dukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan. Sedangkan Misi kelima yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Ada dua sasaran dalam Misi kelima yang diacu oleh kecamatan, yaitu : (1) meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan (2) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Batam Kota Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja akhir Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 244 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423).
24. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Akhir Perubahan Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Kecamatan Batam Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Akhir Perubahan Kecamatan Batam Kota Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir-Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

(2.1) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Batam Kota Triwulan 2

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(3.1). tujuan dan sasaran Renja OPD (3.2), Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 (3.3) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kecamatan Batam Kota sampai triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan, dari target fisik yaitu 13% mencapai 0%
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik 100% Mencapai 93%.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target 1. 100%;2.100% mencapai 1. 100%;75%.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target fisik yaitu 100% Mencapai 97%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari Target Fisik 1.10%;2.100% mencapai 1.10%;2.100%.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batam Kota

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Batam Kota) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024 n-1)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja Kecamatan Batam Kota tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Batam kota tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5%	18%	13%	0%	0%	10%	10%	10%
		2.11.11.2.01 Pengelolaaa n Sampah	Persentase pengangkuta n sampah	92%	82%	87%	100%	115%	90%	90%	90%

		7 UNSUR KEWILAYAHAN									
		7.01 KECAMATAN									
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

		<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>daerah yang terpenuhi</i>								
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Tingkat Kecamatan									
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%
		7.01.05.2.01.08 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	-	-	-	-	-	100 keluarga	100 keluarga	100 keluarga
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%

		7.01.05 PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.01.05.2. 01 Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan terget yang diusulkan (100%).
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

Kode		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1		2	3	4	5	6=5/4
2.11.11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13%	0%	0%
	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87%	100%	115%
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	0%	0%	0%
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%

		Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah			
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1.100% ; 2.100%	1.100% ; 2.100%	1.100% ; 2.100%
	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
7.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	1.Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase warga yang berdaya	1. 10% 2. 100%	1. 10% 2. 100%	1. 10% 2. 100%
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan)	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sapras kelurahan yang dibangun	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan capaian kinerja sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Persampahan, dengan tingkat realisasi 115%;
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan tingkat realisasi 100%;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan tingkat realisasi 1.100%;2.100%
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan tingkat realisasi 0%;
- Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, dengan tingkat realisasi 100%.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan tingkat realisasi 1.10%;2.100%.

3. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan tingkat realisasi 115%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023 yaitu kurangnya sumber daya manusia dan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, telah dilakukan kerja lembur guna, dan telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Kecamatan Batam Kota adalah :

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2026 .

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan.

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kecamatan Batam Kota yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan Batam Kota yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan.

Sasaran Rencana Kerja Akhir Perubahan (Ranhir Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota 2024 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan;
- 2) Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana kerja merupakan perencanaan satu tahun ke depan yang dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan di Kecamatan Batam Kota.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Akhir Perubahan Rencana Kerja selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pendanaan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja OPD Kecamatan Batam Kota melalui APBD Kota Batam, yang merupakan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun.

Rencana Kerja Pagu indikatif Perubahan Tahun 2024 sebesar **Rp. 26.891.368.276,00** yang terdiri dari :

- Program Pengelolaan Persampahan : Rp. 2.228.143.400,00
- Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota: Rp. 16.119.156.066,00
- Program Penyelenggaraan Pemerinta
Han dan pelayanan public : Rp. 8.174.349.850,00
- Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum : Rp. 1.641.106.000,00
- Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan : Rp. 18.189.778.050,00

Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2024 tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi penambahan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD-P TA 2024 sebesar **Rp. 2.488.782.840,00** hal ini disebabkan oleh

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batam Kota

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/ Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Ran- angan)	Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KECAMATAN BATAM KOTA				26.891.368.276 ,00				27.111.894.162,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.228.143.400, 00				3.300.842.171,00
2	1 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.228.143.400, 00				3.300.842.171,00
2	1 1	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkut an sampah yang tidak tuntas		10%	2.228.143.400, 00	APBD		8%	3.300.842.171,0
2	1 1	11	2	1		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkut an sampah		90%	2.228.143.400, 00	APBD		92%	3.300.842.171,0

2	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Batam kota	7488 Ton	2.228.143.400,0	APBD		7488 Ton	2.550.842.171,00
2	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Kecamatan Batam Kota	2 Unit	0.00	APBD		2 unit	750.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				24.663.224.876,00				23.811.051.991,00
	01				KECAMATAN				24.663.224.876,00				23.811.051.991,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	14.661.226.176,00	APBD		100%	16.481.076.992,00
7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	557.305.090,00	APBD		100%	13.683.731.285,00

7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batam Kota	65 Orang/bulan	13.232.649.094,00	APBD		65 orang/bulan	13.535.675.685,00
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Batam Kota	12 Dokumen	0	APBD		12 Dokumen	148.055.600,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	92.828.650,00	APBD		100%	49.481.740,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam kota	1 paket	1.886.000,00	APBD		1 paket	1.429.010,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam kota	4 paket	32.121.500,00	APBD		4 paket	15.864.310,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam kota	2 Paket	24.191.000,00	APBD		2 Paket	10.345.500,00

7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Batam kota	2 paket	31.030.150,00	APBD		2 Paket	18.010.850,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	Kecamatan Batam kota	12 Dokumen	3.600.000,00	APBD		12 Dokumen	2.178.000,00
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batam kota	1 laporan	0.00	APBD		1 laporan	1.654.070,00
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	116.505.000,00	APBD		100%	801.020.000,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kecamatan Batam kota	8 unit	46.555.000,00	APBD		20 unit	400.510.000,00
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Batam kota	7 unit	69.950.000,00	APBD		15 unit	400.510.000,00

7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	1.022.403.432,00	APBD		100%	1.444.871.841,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Batam kota	12 laporan	190.218.800,00	APBD		12 laporan	236.530.800,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam ktoa	12 laporan	832.184.632,00	APBD		12 laporan	1.208.341.041,00
7	01	01	2	09		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	196.840.000,00	APBD		100%	501.972.126,00

7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan batam kota	2 Unit	39.980.000,00	APBD		1 Unit	39.980.000,00
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan batam kota	29 unit	99.740.000,00	APBD		12 unit	62.508.600,00
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan batam kota	47 unit	27.400.000,00	APBD		50 unit	37.328.500,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kecamatan batam kota	1 unit	600.000,00	APBD		1 unit	181.855.026,00

7	01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kecamatan Batam kota	3 unit	29.120.000,00	APBD		3 unit	180.300.000,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD		1.100%; 2.100%	8.174.349.850,00	APBD		1.100%; 2.100%	6.409.525.938,00
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	8.174.349.850,00	APBD		100%	6.409.525.938,00
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Kecamatan Batam kota	2 Laporan	7.848.000.000,00	APBD		2 Laporan	5.480.000.000,00

							Vertikal Terkai							
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan batam kota	12 Dokumen	7.848.000.000,00	APBD		12 dokumen	5.480.000.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	186.542.850,00	APBD		1.10 %; 2.100%	95.000.000,00
7	01	03	2	01	08	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	186.542.850,00	APBD		100 %	95.000.000,00

7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Batam kota	200keluarga	89.515.000,00	APBD		200 Keluarga	95.000.000,00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Batam kota	650 Keluarg	52.514.000,00	APBD		50 keluarga	0.00

7	01	03	206	07		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Batam kota	100 Keluarga	44.513.850,00	APBD		50 keluarga	0.00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	1.641.106.000,00	APBD		100 %	825.449.061,00
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	1.641.106.000,00	APBD		100 %	825.449.061,00

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Batam kota	2350 orang	295.642.000,00	APBD		2350 orang	9.516.650,00
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra	Kecamatan Batam Kota	6654 Orang	961.544.000,00	APBD		6654 Orang	545.932.411,00

						Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional							
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan batam kota	4 Dokumen	383.920.000,00	APBD		2 Laporan	270.000.000,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	0001				KELURAHAN SUKAJADI				902.657.750,00	APBD			1.041.363.409,86
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	172.252.200,00	APBD		100%	270.760.577,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	120.821.400,00	APBD		100%	48.052.730,00

7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	1 Paket	708.000,00	APBD		1 Paket	0.00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	3 paket	6.101.000,00	APBD		3 paket	15.864.310,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	4 paket	108.244.000,00	APBD		4 paket	10.345.500,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	2 paket	4.868.400,00	APBD		2 paket	18.010.850,00
7	01	01	2	06	009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	12 dokumen	900.000,00	APBD		12 dokumen	2.178.000,00
7	01	01	2	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kelurahan Sukajadi	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	1.654.070,00

							dan Konsultasi SKPD							
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	50.830.800,00	APBD		100 %	104.531.706,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan kajadi	12 laporan	50.830.800,00	APBD		12 laporan	55.176.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan	12 laporan	0.00	APBD		12 laporan	49.355.706,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00	APBD		100 %	118.176.141,00

7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan sukajadi	1 unit	0.00	APBD		1 unit	363.000.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan sukajadi	1 Unit	600.000,00	APBD		1 Unit	117.813.141,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	730.405.550,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	770.602.832,86
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang		10%	559.201.550,00	APBD		10%	740.602.832,86

							Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan							
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan sukajadi	6 lembaga	37.450.000,00	APBD		6 lembaga	28.293.732,50
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan sukajadi	3 unit	445.751.700,00	APBD		2 unit	636.288.343,35
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan sukajadi	150 pokmas/ormas	75.999.850,00	APBD		150 pokmas/ormas	76.020.757,01
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	171.204.000,00	APBD		100 %	30.000.000,00

7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan sukajadi	100 Keluarga	28.534.000,00	APBD		100 Keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan sukajadi	100 Keluarga	28.534.000,00	APBD		100 keluarga	0.00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	Kelurahan sukajadi	100 Keluarga	28.534.000,00	APBD		100 keluarga	0.00

							Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan sukajadi	100 keluarga	28.534.000,00	APBD		100 keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	Kelurahan sukajadi	100 keluarga	28.534.000,00	APBD		100 keluarga	0.00

							an Ekonomi Lainnya							
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan sukajadi	100 keluarga	28.534.000,00	APBD		100 keluarga	0.00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.626.242.380,00				3.127.635.373,54
7	01					KECAMATAN				3.626.242.380,00				3.127.635.373,54
7	01	0002				KELURAHAN TAMAN BALOI				3.626.242.380,00	APBD			3.127.635.373,54
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	236.169.430,00	APBD		100%	307.790.159,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	129.846.150,00	APBD		100%	71.338.333,00

7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	1 Paket	703.000,00	APBD		1 Paket	2.116.290,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	3 paket	6.918.950,00	APBD		3 paket	24.031.205,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	3 Paket	116.893.000,00	APBD		3 Paket	20.207.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	2 paket	5.331.200,00	APBD		2 paket	20.430.850,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	12 dokumen	0.00	APBD		12 dokumen	2.898.918,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kelurahan Taman Baloi	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	1.654.070,00

							dan Konsultasi SKPD							
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	105.723.280,00	APBD		100 %	118.638.685,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	12 laporan	60.729.300,00	APBD		12 laporan	59.893.185,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	12 laporan	44.993.980,00	APBD		12 laporan	58.745.500,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000	APBD		100 %	117.813.141,00

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan taman baloi	1 Unit	600.000,00	APBD		1 Unit	117.813.141,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	3.390.072.950,00	APBD		1.10%; 2.100%	2.819.845.214,54
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	3.218.293.900,00	APBD		10%	2.789.845.214,54
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	Kelurahan taman baloi	6 lembaga	26.714.800,00	APBD		6 lembaga	24.267.457,50

						Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan taman baloi	22 unit	3.074.531.200,00	APBD		9 unit	2.659.170.190,06
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taman Baloi	150 pokmas/ormas	117.047.900,00	APBD		150 pokmas/ormas	106.407.566,98
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	171.779.050,00	APBD		100 %	30.000.000,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan taman baloi	100 keluarga	28.629.550,00	APBD		50 keluarga	15.000.000,00

7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan taman baloi	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 keluarga	0.00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan taman baloi	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 keluarga	0.00

7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan taman baloi	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan taman baloi	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 keluarga	0.00

7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan taman baloi	100 keluarga	28.629.900,0	APBD		50 keluarga	0.00
7	01					KECAMATAN				4.133.107.620,00				3.030.018.430,2
7	01	0003				KELURAHAN BALOI PERMAI				4.133.107.620,00	APBD			3.030.018.430,2
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	274.359.920,0	APBD		100%	377.399.353,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	127.997.000,00	APBD		100%	44.457.215,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Baloi Permai	1 Paket	706.000,00	APBD		1 Paket	2.020.095,00

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	3 paket	5.243.250,00	APBD		3 paket	605.000,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	3 paket	115.468.000,00	APBD		3 Paket	15.427.500,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	2 paket	6.579.750,00	APBD		2 paket	22.572.550,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	12 Dokumen	0.00	APBD		12 Dokumen	2.178.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan baloi permai	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	1.654.070,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase kebutuhan jasa penunjang		100%	145.762.920,00	APBD		100 %	215.128.997,00

						Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Baloi permai	12 Laporan	85.026.400,00	APBD		12 Laporan	63.888.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	12 Laporan	60.736.520,00	APBD		12 Laporan	151.240.997,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00	APBD		100 %	117.813.141,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kelurahan baloi permai	1 Unit	600.000	APBD		1 Unit	117.813.141,00

7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	3.858.747.700,00	APBD		1.10%; 2.100%	2.652.619.077,28
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	3.686.968.650,00	APBD		10%	2.622.619.077,28
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan baloi permai	6 Lembaga	39.767.800,00	APBD		6 Lembaga	21.302.655,00

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan baloi permai	24 unit	3.530.755.900,00	APBD		17 unit	2.546.471.236,28
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan baloi permai	300 Pokmas/Ormas	116.444.950,00	APBD		300 Pokmas/Ormas	54.845.186,00
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	171.779.050,00	APBD		100 %	30.000.000,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan baloi permai	100 keluarga	28.629.550,00	APBD		50 keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan	Kelurahan baloi permai	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00

							Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
7	0 1	03	20 6	0 6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelura han Balo i Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Kelua rga	0.00
7	0 1	03	20 6	0 7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Kelura han Balo i permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Kelua rga	15.000.000,00

							Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00

7	01					KECAMATAN				1.942.069.820,00				2.309.210.376,28
7	01	0004				KELURAHAN TELUK TERING				1.942.069.820,00	APBD			2.309.210.376,28
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya a penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	236.539.770,00	APBD		100%	345.540.198,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	129.143.250,00	APBD		100%	72.024.645,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	1 Paket	641.000,00	APBD		1 Paket	1.524.600,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	3 Paket	6.100.250,00	APBD		3 Paket	25.473.525,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	3 Paket	114.318.000,00	APBD		3 Paket	19.299.500,00

7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	2 paket	6.284.000,00	APBD		2 paket	21.894.950,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	12 Dokumen	1.800.000,00	APBD		12 Dokumen	2.178.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan teluk tering	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	1.654.070,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	106.796.520,00	APBD		100 %	155.339.412,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	Kelurahan teluk tering	12 Laporan	46.060.000,00	APBD		12 Laporan	56.628.000,00

							Listrik yang Disediakan							
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	12 Laporan	60.736.520,00	APBD		12 Laporan	98.711.412,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00	APBD		100 %	118.176.141,00
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan teluk tering	1 unit	0.00	APBD		1 unit	363.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kelurahan Teluk Tering	1 Unit	600.000,00	APBD		1 Unit	117.813.141,00

							dipelihara/ direhabilitasi							
7	0 1	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	1.705.530.050, 00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	1.963.670.178,28
7	0 1	03	2	0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanj uti ke Musrenbang Kecamatan		1.10%; 2.100%	1.533.318.750, 00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	1.933.670.178,28
7	0 1	03	2	0 2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna	Kelura han teluk tering	6 Lembaga	31.267.750,00	APBD		6 Lemb aga	28.293.732,50

							n di Kelurahan							
7	0 1	03	2	0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelura han teluk tering	4 unit	1.414.411.200, 00	APBD		4 unit	1.827.347.236,28
7	0 1	03	2	0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Kelura han teluk tering	150 Pokmas/ ormas	87.639.800,00	APBD		150 Pokm as/or mas	78.029.209,50
7	0 1	03	20 6			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	172.211.300,00	APBD		100 %	30.000.000,00
7	0 1	03	20 6	0 3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelura han teluk tering	100 keluarga	28.701.650,00	APBD		50 Kelua rga	15.000.000,00

7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan teluk tering	100 keluarga	28.701.650,00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Teluk Tering	100 Keluarga	28.701.650,00	APBD		50 Keluarga	0.00

7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan teluk tering	100 keluarga	28.701.650,0	APBD		50 keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan teluk tering	100 keluarga	28.701.650,00	APBD		50 keluarga	0.00

7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan teluk tering	100 keluarga	28.703.050,00	APBD		50 keluarga	0.00
7	01					KECAMATAN				5.362.042.680,00				674.160.947,92
7	01	0004				KELURAHAN BELIAN				5.362.042.680,00	APBD			674.160.947,92
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	279.969.980,00	APBD		100%	317.977.197,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	126.734.800,00	APBD		100%	89.461.350,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Belian	1 Paket	899.000,00	APBD		1 Paket	1.887.600,00

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan belian	3 Paket	5.783.500,00	APBD		3 Paket	35.160.180,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Belian	2 Paket	114.818.000,00	APBD		2 Paket	19.360.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Belian	2 paket	5.234.300,00	APBD		2 paket	29.221.500,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Belian	12 Dokumen	0.00	APBD		12 Dokumen	2.178.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Belian	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	1.654.070,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah		100 %	152.635.180,00	APBD		100 %	110.339.706,00

							n daerah yang terpenuhi							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Belian	12 Laporan	107.641.200,00	APBD		12 Laporan	60.984.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Belian	12 Laporan	44.993.980,00	APBD		12 Laporan	49.355.706,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00	APBD		100 %	118.176.141,00
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Kelurahan Belian	1 unit	0.00	APBD		1 unit	363.000,00

							Pajak dan Perizinannya							
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Belian	1 Unit	600.000,00	APBD		1 Unit	117.813.141,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	5.082.072.700,00	APBD		1.10%; 2.100%	356.183.750,92
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		1.10%; 2.100%	4.911.622.250,00	APBD		1.10%; 2.100%	326.183.750,92

7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Belian	6 Lembaga	31.753.300,00	APBD		6 Lembaga	28.293.732,50
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan belian	29 unit	4.814.445.100,00	APBD		26 unit	235.744.536,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Belian	500 Pokmas/or mas	65.423.850,00	APBD		500 Pokmas/or mas	62.145.482,42
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	170.450.450,00	APBD		100 %	30.000.000,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Kelurahan belian	100 keluarga	28.408.700,00	APBD		50 Keluarga	15.000.000,00

							Pangan Keluarga							
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Belian	100keluarga	28.408.350,00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Kelurahan Belian	100 Keluarga	28.408.350,00	APBD		50 Keluarga	0.00

							dan Berdaya Saing							
7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Belian	100 keluarga	28.408.350,00	APBD		50 keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	Kelurahan Belian	100 keluarga	28.408.350,00	APBD		50 keluarga	0.00

							an Ekonomi Lainnya							
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Belian	100 keluarga	28.408.350,00	APBD		50 keluarga	0.00
7	01					KECAMATAN				3.495.044.840,00				4.903.799.588,00
7	01	0004				KELURAHAN SUNGAI PANAS				3.495.044.840,00	APBD			4.903.799.588,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	258.638.590,00	APBD		100%	320.059.009,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	139.865.250,00	APBD		100%	75.571.155,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kelurahan Sungai panas	1 Paket	739.000,00	APBD		1 Paket	1.494.955,00

							Kantor yang Disediakan							
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	3 Paket	7.118.000,00	APBD		3 Paket	35.160.180,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	2 Paket	124.587.000,00	APBD		2 Paket	13.612.500,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	2 paket	6.521.250,00	APBD		2 paket	21.471.450,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	12 Dokumen	900.000,00	APBD		12 Dokumen	2.178.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sungai Panas	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	1.654.070,00

7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	118.173.340,00	APBD		100 %	126.311.706,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	12 Laporan	76.430.800,00	APBD		12 Laporan	76.956.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	12 Laporan	41.742.540,00	APBD		12 Laporan	49.355.706,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00	APBD		100 %	118.176.148,00

7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sungai Panas	1 unit	0.00	APBD		1 unit	363.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Sungai Panas	1 Unit	600.000,00	APBD		1 Unit	117.813.148,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	3.236.406.250,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	4.583.740.579,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang		1.10%; 2.100%	3.065.374.450,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	4.553.740.579,00

							Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan							
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Panas	6 Lembaga	27.265.700,00	APBD		6 Lembaga	28.293.732,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Sungai Panas	15 unit	2.956.479.800,00	APBD		15 unit	4.423.135.539,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Panas	300 Pokmas/Ormas	81.628.950,00	APBD		300 Pokmas/Ormas	102.311.308,00
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	171.031.800,00	APBD		100 %	30.000.000,00

7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Sungai Panas	100 keluarga	28.505.300,00	APBD		50 Keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Sungai Panas	100 keluarga	28.505.300,00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	Kelurahan Sungai Panas	100 Keluarga	28.505.300,00	APBD		50 Keluarga	0.00

							Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan sungai panas	100 keluarga	28.505.300,00	APBD		50 keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	Kelurahan Sungai Panas	100 keluarga	28.505.300,00	APBD		50 keluarga	0.00

							an Ekonomi Lainnya							
7	0 1	03	20 6	0 9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelura han Sungai Panas	100 keluarga	28.505.300,00	APBD		50 kelua rga	0.00

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota Tahun 2021 – 2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Kecamatan Batam Kota. Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Batam Kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2024, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2024.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-

sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Batam Kota Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2024 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Kecamatan Batam Kota);.
2. Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Batam Kota Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;

4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batam Kota Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Batam Kota Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Batam, Juni 2024

Camat Batam Kota



FIRMAN HIDAYAT, S.E
NIP. 19850522 201101 1 003